

**LAPORAN REALISASI AKHIR KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
NERACA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2021**



Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran. posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya. 4 Februari 2022
Kepala Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah.

Drs. H. M. Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015



Daftar Isi

Daftar Tabeliii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1

 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 2

BAB II..... 3

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 3

PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD 3

 2.1 Kebijakan Keuangan 3

 2.2 Pencapaian Target Kinerja 3

BAB III 5

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... 5

 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... 5

 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan..... 7

BAB IV 8

KEBIJAKAN AKUNTANSI..... 8

 4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan 8

 4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan..... 8

 4.3 Basis Pengukuran..... 8

BAB V 19

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 19

 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran..... 19

 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional..... 24

 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca 26

 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas..... 27



Daftar Tabel

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20205

Tabel 2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan5

Tabel 3. Realiasi Pencapaian Pendapatan Tahun 20205

Tabel 4. Realisasi Belanja tahun 20206

Tabel 5. Realisasi pencapaian target pendapatan tahun 202019

Tabel 6. Realiasi Belanja tahun 202020

Tabel 7. Realisasi Belanja Operasi tahun 202020

Tabel 8. Realisasi belanja pegawai tahun 202021

Tabel 9. Realiasi belanja barang dan jasa tahun 202023

Tabel 10. Realisasi belanja modal tahun 2020.....24

Table 11. Pendapatan 2020 dan 201924

Tabel 12. Pendapatan Asli Daerah 2020 – LO24

Tabel 13. Beban Pegawai – LO25

Tabel 14. Beban Barang dan Jasa – LO25

Tabel 15. Beban Peralatan dan Mesin – LO26

Tabel 16. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO.....26

Tabel 17. Aset Tetap.....27

Tabel 18. Saldo Ekuitas Akhir.....27



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
2	Pendapatan Pajak Daerah				
3	Pendapatan Retribusi Daerah	1.268.033.605	1.323.913.052	104.41	1.302.420.957
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.268.033.605	1.323.913.052	104.41	1.302.420.957
6					
7	JUMLAH PENDAPATAN	1.268.033.605	1.323.913.052	104.41	1.302.420.957
8					
9	BELANJA DAERAH				
10					
11	BELANJA OPERASI	4.372.554.472	4.271.807.842	97.70	3.655.524.275
12	Belanja Pegawai	2.925.501.869	2.887.713.351	98.71	2.213.176.143
13	Belanja Barang dan Jasa	1.447.052.603	1.384.094.491	95.65	1.442.348.132
14	Belanja Hibah				
15					
16	BELANJA MODAL	150.750.000	141.790.000	94.06	67.295.000
17	Belanja Tanah				
18	Belanja Peralatan dan Mesin	150.750.000	141.790.000	94.06	67.295.000
19	Belanja Bangunan dan Gedung				
20	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan				
21	Belanja Aset Tetap Lainnya				
22	Jumlah Belanja Modal	150.750.000	141.790.000	94.06	67.295.000
23					
24	JUMLAH BELANJA	4.523.304.472	4.413.597.842	97.57	3.722.819.275
25					
26		(3.255.270.867)	(3.089.684.790)	94.91	(2.420.398.318)

Praya, 4 Februari 2022

Kepala Diskominfo
Kab. Lombok Tengah

Drs. H. M. Zarkasi
NIP. 1966070161993031015



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	URAIAN	LO 2021	LO 2020
1	PENDAPATAN OPERASIONAL		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.293.824.119	1.190.662.063
3	Pendapatan Pajak Daerah		
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.293.824.119	1.190.662.063
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan		
6	Lain - lain PAD Yang Sah		
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.293.824.119	1.190.662.063
8			
9	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
10	Pendapatan Hibah -LO		
11	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Yang Sah		
12	JUMLAH PENDAPATAN	1.293.824.119	1.190.662.063
13			
	BEBAN DAERAH		
14	BEBAN OPERASI	4.738.119.282	4.144.798.490
15	Beban Pegawai	2.887.713.351	2.213.176.143
16	Beban Barang dan Jasa	1.384.422.200	1.447.583.606
17	Beban Bunga		
18	Beban Hibah		
19	Beban Bantuan Sosial		
20	Beban Penyisihan		
21	Beban Lain-lain		
22	Beban Penyusutan dan Amortisasi	465.983.731	484.038.740,7
23	Beban Transfer/Beban Bantuan Keuangan		
24	Beban Tak Terduga		
30	Jumlah Beban	4.738.119.282	4.144.798.490
31			
32	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.444.295.163)	(2.954.136.427)
33			
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL		
34	SURPLUS NON OPERASIONAL		
35	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
36	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
37	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek - LO		
38	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
	DEFISIT NON OPERASIONAL		682.991.73
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		682.991.73
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		682.991.73
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.444.295.163)	(2.954.819.418)
41			
42	POS LUAR BIASA		
	Pendapatan Luar Biasa		
43	Beban Tak Terduga		
45	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		
46	SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.444.295.163)	(2.954.819.418)

Praya, 4 Februari 2022
Kepala Diskominfo
Kab. Lombok Tengah

Drs. H. M. Zarkasi
NIP. 1966070161993031015



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
N E R A C A
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No	URAIAN	2021	2020
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di BLUD		
7	Setara Kas		
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)		
9	Kas di Bendahara BOS		
10	Kas lainnya		
11	Piutang Pendapatan	4.709.600	34.798.533
12	Piutang Pajak Daerah		
13	Piutang Retribusi Daerah		30.088.933
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan		
15	Piutang Lain-lain PAD	4.709.600	4.709.600
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
17	Penyisihan Piutang Pendapatan		
18	Piutang Lainnya		
19	Uang Muka Pekerjaan		
20	Piutang Lain-lain Lainnya		
21	Penyisihan Piutang Lainnya		
22	Beban Dibayar Dimuka	177.583.333.33	177.911.042.67
23	Persediaan	2.488.500.00	2.128.500
24	JUMLAH ASET LANCAR	184.781.433.33	214.838.075.67
25			
26	ASET TETAP		
27	Tanah	1.130.500.000	1.130.500.000
28	Peralatan dan Mesin	4.939.404.090.43	4.797.614.090.43
29	Gedung dan Bangunan	1.108.819.250	1.108.819.250
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.000.000	5.000.000
31	Aset Tetap Lainnya		
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
33	Akumulasi Penyusutan	(4.180.928.872.39)	(3.714.945.141)
34	JUMLAH ASET TETAP	2.982.294.468.04	3.326.988.199
35			
36	ASET LAINNYA		
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
38	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III		
39	Aset Tidak Berwujud		
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
41	Aset Lain-lain		
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
43	JUMLAH ASET LAINNYA		
44			
45	JUMLAH ASET	3.167.075.901.37	3.541.826.274.71
46			
47	KEWAJIBAN		



48	Kewajiban Jangka Pendek		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
50	Utang Bunga		
51	Pendapatan Diterima Dimuka		
52	Utang Belanja		
53	Utang Transfer		
54	Utang Jangka Pendek Lainnya		
55	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56			
57	JUMLAH KEWAJIBAN		
58	EKUITAS		
59	EKUITAS	3.167.075.901.37	3.541.826.275
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.167.075.901.37	3.541.826.274.71

Praya, 4 Februari 2022
Kepala Diskominfo
Kab. Lombok Tengah

Drs. H. M. Zarkasi
NIP. 1966070161993031015



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	2021	2020
	EKUITAS AWAL	3.541.826.275	4.080.456.107.18
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(3.444.295.163)	(2.954.819.418.47)
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(20.500.000)	(254.022.502.00)
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	(249.308.302.00)
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	(20.500.000.00)	(4.714.200.00)
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	3.089.684.790.00	2.670.212.088.00
	EKUITAS AKHIR	3.166.715.901.37	3.541.826.274.71

Praya, 4 Februari 2022
Kepala Diskominfo
Kab. Lombok Tengah

Drs. H. M. Zarkasi
NIP. 1966070161993031015

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca SKPD, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan SKPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Sedangkan Neraca SKPD merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode tahun anggaran 2021. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai :

1. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
2. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
3. Perubahan posisi keuangan SKPD selama pelaksanaan APBD tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Tahun 2021, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019; dan
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun 2021. disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Keuangan. dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Program Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

VII Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mencakup aspek kebijakan dibidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sedangkan dibidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.2 Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mempunyai 5 program dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program program APBD SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

memiliki kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;

Program Informasi dan Komunikasi Publik memiliki kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika memiliki kegiatan-kegiatan diantaranya:

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan e-Government di di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki kegiatan-kegiatan diantaranya:

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki kegiatan-kegiatan diantaranya:

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2019 dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 4,523,304,472.00.- dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 1.268.033.605.-.

NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	Pendapatan	1,268,033,605.00
2	Belanja	4,523,304,472.00

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$
1	Pendapatan	1,268,033,605.00	1,323,913,052.00	104.41
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	
	- Pendapatan Asli Daerah	1,268,033,605.00	1,323,913,052.00	104.41
2	Belanja	4,523,304,472.00	4,413,597,842.00	97.57
	- Belanja Operasi	4,372,554,472.00	4,271,807,842.00	97.70
	- Belanja Modal	150,750,000.00	141,790,000.00	94.06

Tabel 2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2021

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan

Realisasi pencapaian pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 mencapai hasil 104.41 % dari target yang ditetapkan. Capaian ini didapat dari hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp. 1.323.913.052.- dari target sebesar Rp. 1.268.033.605.- yang dirinci dalam rekening pendapatan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	%
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$
1	Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi	1,268,033,605.00	1,323,913,052.00	104.41
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	
	TOTAL	1,268,033,605.00	1,323,913,052.00	104.41

Tabel 3. Realiasi Pencapaian Pendapatan Tahun 2021

3.1.2 Belanja

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp. 4.413.597.842.- atau 97.57%. dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp.4.523.304.472.- yang dirinci dalam jenis belanja sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA		ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI	%
1	2		3	4	5=(4/3)*100
1	Belanja Pegawai		2,925,501,839	2,887,713,351	98.71
	1	Gaji dan Tunjangan PNS	1.485.072.386	1.471.062.940	99.06
	2	Tunjangan Keluarga	157.280.759	155.067.760	98.59
	3	Tunjangan Jabatan	134.388.250	133.910.000	99.64
	4	Tunjangan fungsional umum	48.153.250	47.440.000	98.52
	5	Tunjangan Beras	91.136.949	90.525.000	99.33
	6	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	4.075.225	4.067.392	99.81
	7	Pembulatan Gaji	2.167.340	21.910	101
	8	Tambahan Penghasilan PNS	920.842.000	907.423.619	98.54
	9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	63.401.680	59.210.730	93.39
	10	Beban Honorarium	18.984.000	18.984.000	100
2	Belanja Barang Jasa		1,466,036,603	1,384,094,491	94.41
	1	Belanja Bahan Pakai Habis	249.060.975	246.092.340	98.81
	2	Belanja Jasa Kantor	1.189.845.628	1.112.021.792	93.46
	3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.400.000	7.053.750	95.32
	4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000	9.306.609	93.07
	5	Belanja Perjalanan dinas	9.730.000	9.620.000	98.87
3	Belanja Modal		150750000	141790000	94.06
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150750000	141790000	94.06
	T O T A L		4.523.304.472	4.413.597.842	97.75

Tabel 4. Realisasi Belanja tahun 2021

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Belanja dan Pendapatan yang tidak optimal antara lain :

1. Realisasi Belanja
 - a. Belanja Honorarium PNS. terdapat nama yang tercantum di Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan sedang dalam Tugas Belajar dan terdapat perbedaan antara jumlah tim yang tertera dalam DPA dengan jumlah tim yang tertuang dalam Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan.
2. Realisasi Pendapatan
 - a. Retribusi Menara Telekomunikasi. dasar penagihan retribusi yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara Telekomunikasi baru selesai dibuat pada pertengahan tahun 2019.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Kemandirian entitas. berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
2. Asumsi kesinambungan entitas. berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
3. Asumsi keterukuran. berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - a. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

a. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

b. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara

Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

c. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

d. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

e. Belanja Lain lain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1) **Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

- **Bagian Lancar Tuntutan Perbendahraan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

2) **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen

- **Investasi Permanen.** Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20, antara 20 sampai 50, atau kepemilikan kurang dari 20 tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50 menggunakan metode ekuitas.

- **Investasi Non Permanen.** Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya. yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat. Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3) **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Tanah.** Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk

melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

- **Gedung dan Bangunan.** Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- **Jalan, Irigasi dan Jembatan.** Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.
- **Peralatan dan Mesin.** Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- **Aset Tetap Lainnya.** Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.
- **Konstruksi Dalam Pengerjaan.** Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada

tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan prolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

- **Tagihan Penjualan Angsuran.** Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.
- **Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.** Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- **Aset Tak Berwujud.** Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat

dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

- **Aset Lain-lain.** Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

5) Kewajiban

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembalidalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek.** Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
 - b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

c. Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPh)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPh yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut.

- **Kewajiban Jangka Panjang.** Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

6) **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.

Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

7) **Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara

pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

4.1.2 Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

PENDAPATAN PER 31 DESEMBER 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 1.323.913.052.- yang terdiri atas:

a. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.323.913.052.-. Nilai tersebut didapat dari pembayaran retribusi menara telekomunikasi (menara telekomunikasi) dari:

1. PT. XL AXIATA	Rp. 17.193.676
2. PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI)	Rp. 30.088.933
3. PT. TOWER BERSAMA	Rp. 103.162.056
4. PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA (SKP)	Rp. 12.895.257
5. PT. KOMET INFRA NUSANTARA (KIN)	Rp. 73.073.123
6. PT. INDOSAT	Rp. 25.790.514
7. PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP)	Rp. 146.146.246
8. PT. INTI BANGUN SEHJAHTERA (IBS)	Rp. 30.088.933
9. PT. PERSADA SOKA TAMA (PTS)	Rp. 378.260.872
10. PT. DAYA MITRA	Rp. 73.073.123
11. PT. SOLUSINDO KREASI PRATAM (SKP)	Rp. 4.298.149
12. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Rp. 313.784.587
13. PT. TELEKOMUNIKASI	Rp. 47.282.609
14. PT. DAYA MITRA	Rp. 25.790.514
15. PT. GAMETRACO	Rp. 12.895.257
16. PT. PERSADA SOKA TAMA (PTS) (PIUTANG 2020)	Rp. 30.088.933

b. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 0.-

Bukti Setor atas pendapatan yang tersebut di atas terlampir (lampiran 1).

Berikut daftar realisasi pencapaian target pendapatan tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah:

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	%
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$
1	Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi	1,268,033,605.00	1,323,913,052.00	104.41
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	
	TOTAL	1,268,033,605.00	1,323,913,052.00	104.41

Tabel 5. Realisasi pencapaian target pendapatan tahun 2021

5.1.1 Belanja

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Perubahan APBD 2021 sebesar Rp. 4.523.304.472.- realisasinya mencapai Rp. 4.413.597.842.- atau 97.75 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 109.706.630.-. Adapun perincian dari realisasi belanja daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Belanja Operasi	4.372.554.472	4,271,807,842	97.70
2.	Belanja Modal	150.750.000	141.790.000	94.06
Jumlah		4.523.304.472	4.413.597.842	94.91

Tabel 6. Realiasi Belanja tahun 2021

1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.271.807.842.- atau 97.75 dari anggaran sebesar Rp 4.372.554.472.- .Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	2.925.501.869	2.887.713.351	98.71
2	Belanja Barang dan Jasa *Belanja barang jasa selain hibah	1.447.052.603	1.384.094.491	95.65
	Total	4.372.554.472	4.271.807.842	97.70

Tabel 7. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.887.713.351.- dari target anggaran sebesar Rp. 2.925.501.869.- atau 98.71% dari target belanja operasi secara keseluruhan.

Berikut adalah rincian belanja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021:

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
1	Gaji dan Tunjangan PNS	1.485.072.386	1.479.194.540	99.60
2	Tunjangan Keluarga	157.280.759	155.067.760	98.59
3	Tunjangan Jabatan	134.388.250	133.910.000	99.64
4	Tunjangan fungsional umum	48.153.250	47.440.000	98.52
5	Tunjangan Beras	91.136.949	90.525.000	99.63
6	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	4.075.225	4.067.392	99.81
7	Pembulatan Gaji	2.167.340	21.91	1.01
8	Tambahan Penghasilan PNS	920.842.000	907.423.619	98.54
9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	63.401.680	59.210.730	93.39
10	Beban Honorarium	18.984.000	18.984.000	100
Jumlah		2.925.501.869	2.887.713.351	98.71

Tabel 8. Realisasi belanja pegawai tahun 2021

b). Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.447.052.603.- Dari pagu tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.384.094.491.- atau 95.65%.

Berikut adalah rincian belanja barang dan jasa Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2021:

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	249.060.975	246.092.340	98.81
	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	48.471.750	48.471.240	100.00
	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	500.000	500.000	100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	75.370.325	75.177.600	99.74
	Belanja Alat/Bahan untuk	1.000.000	945.000	94.50

	kegiatan Kantor – Benda POS			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan Komputer	12.883.700	12.685.000	98.46
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Prabot Kantor	2.605.200	2.603.500	99.93
	Makan dan Minum Rapat	108.230.000	105.710.000	97.67
	Beban Jasa Kantor	1,170,861,628	1,112,021,792	94.97
	Honorarium Narasumber atau Pembahas.Moderat or.Pembawa Acara dan Panitia	128.380.000	122.710.000	95.58
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal. Buletin. Majalah. Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	12.600.000	0	0.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.600.000	9.600.000	100.00
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	267.600.000	262.600.000	98.13
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000	4.140.000	57.50
	Belanja Kawat/Faksimili/In ternet/TV Berlangganan	742.331.628	710.739.958	95.74
	Belanja Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan	3.150.000	2.231.834	70.85
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.400.000	7.053.750	95.32
	Belanja Sewa	7.400.000	7.053.750	95.32

	Peralatan Komputer Lainnya			
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000	9.306.609	93.07
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.000.000	2.316.091	77.20
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	7.000.000	6.990.518	99.86
6	Belanja Perjalanan Dinas	9.730.000	9.620.000	98.87
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130.000	100.000	76.92
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000	9.520.000	99.17
	Jumlah	1.447.052.603	1.384.094.491	95.65

Tabel 9. Realiasi belanja barang dan jasa tahun 2021

c). Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pengadaan asset atau belanja modal. Realisasi belanja modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 141.790.000.- atau 94.06 dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 150.750.000.- Adapun belanja modal yang dimaksud adalah belanja modal peralatan dan mesin. Berikut rincian belanja modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021:

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal			
Peralatan dan Mesin	150750000	141790000	94.06
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.750.000	2.750.000	100.00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	19.200.000	18.540.000	96.56
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	28.800.000	20.500.000	71.18

Tabel 10. Realisasi belanja modal tahun 2021

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

1. Pendapatan - LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. dengan realisasi dalam TA 2021 sebagai

PENDAPATAN LO :	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.323.913.052	1.190.662.063
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-
Jumlah	1.323.913.052	1.190.662.063

Table 11. Pendapatan 2021 dan 2020

Adapun masing-masing realisasi akun pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2021. Realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.323.913.052.- dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31 DESEMBER 2021
	(Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	1,323,913,052.00
Jumlah	1,323,913,052.00

Tabel 12. Pendapatan Asli Daerah 2021 - LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Tengah didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pajak Retribusi Menara Telekomunikasi.

2. Beban - LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. dengan realisasi dalam tahun 2021 sebagai berikut :

A. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp 2.887.713.351.- dengan rincian sebagai berikut :

Beban Pegawai :	131 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2020
	(Rp)	(Rp)
Beban Pegawai	2,887,713,351.00	2,213,176,143.00
Jumlah	2,887,713,351.00	2,213,176,143.00

Tabel 13. Beban Pegawai - LO

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual. pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban. sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021.

B. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan saldo belanja jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.384.094.491.- dengan rincian sebagai berikut :

Beban Jasa :	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
	(Rp)	(Rp)
Beban Jasa	1,384,094,491.00	1,447,583,606.00
Jumlah	1,384,094,491.00	1,447,583,606.00

Tabel 14. Beban Jasa – LO

C. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo belanja jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.- dengan rincian sebagai berikut :

Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
	(Rp)	(Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	465,983,731.00	484,038,740.00
Jumlah	465,983,731.00	484,038,740.00

Tabel 15. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO

3. Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit dari Operasional merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

Surplus/defisit Non Operasional :	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
	(Rp)	(Rp)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset	-	682,991.73
Jumlah	-	682,991.73

Tabel 16. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

5.1.2 Aset

1. Aset Lancar

Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 184,781,433.33.- yang terdiri dari:

a. Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4,709,600.- . Nilai tersebut didapat dari:

- Piutang lain-lain PAD sebesar Rp. 4.709.600.- ;

b. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 sebesar Rp. 177,583,333.33.-.

c. Persediaan

Saldo persediaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2,488,500.-. Nilai tersebut didapat dari pencatatan sisa barang pakai habis (stock opname) selama satu periode anggaran. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname terlampir (Lampiran)

2. Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 3.468.778.199.04.- Nilai Aset Tetap tersebut merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berupa:

No.	Uraian	Saldo per 31 -12 - 2021 (Rp.)	Saldo per 31 - 12 - 2020 (Rp.)
1	Tanah	1,130,500,000.00	1,130,500,000.00
2	Peralatan dan Mesin	4,918,904,090.43	4,797,614,090.43
3	Gedung dan Bangunan	1,108,819,250.00	1,108,819,250.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5,000,000.00	5,000,000.00
5	Akumulasi Penyusutan	-4,180,928,872.39	-3,714,945,141.39
	J u m l a h	2,982,294,468.04	3,326,988,199.04

Tabel 17. Aset Tetap

5.1.3 Kewajiban

Per 31 Desember 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki kewajiban yang harus disetor atau dibayarkan

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3,167,075,901.37.- adalah merupakan kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

No.	Uraian	Saldo per 31 -12 - 2021 (Rp.)	Saldo per 31 - 12 - 2020 (Rp.)
1	Ekuitas	3,167,075,901.37	3,541,826,274.71
	J u m l a h	3,167,075,901.37	3,541,826,274.71

Tabel 18. Saldo Ekuitas Akhir

Praya. 4 Februari 2022
Kepala Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah.

Drs. H. M. Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Jendral Ahmad Yani No.2 Praya. (0370) 654091 Praya 83511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini. Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ninuk Sivia. SE
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai kepada:

Nama Lengkap : Akhdiyat Fahroni. ST
Jabatan : Penyimpan/Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu. kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah barang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah:

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Amplop Kertas	1	Dus	15,000	15,000
2	Amplop Surat	0	Box	28,000	-
3	Ballpoint	0	Pack	35,000	-
4	Battery A2	0	Pcs	15,000	-
5	Battery A3	1	Pcs	15,000	15,000
6	Battery A4	0	Pcs	45,000	-
7	Binder Clip 107	1	Box	35,000	35,000
8	Binder Clip 155	1	Box	60,000	30,000
9	Binder Clip 260	1	Box	90,000	90,000
10	Box File Tylo	4	Lembar	21,000	84,000
11	Buku Agenda	2	Buah	35,000	70,000
12	Buku Ekspedisi	1	Buah	10,000	10,000
13	Buku Folio	1	Buah	25,000	25,000
14	Buku Tulis	1	Buah	30,000	30,000
15	Cutter	0	Buah	21,000	-
16	Double Tape	0	Buah	8,500	-
17	Gunting	1	Buah	10,000	10,000
18	Isi Cutter	0	Buah	9,000	-
19	Isi Staples Besar	2	Kotak	5,000	10,000
20	Isi Staples Kecil	1	Kotak	3,000	3,000
21	Isi Ulang Pengharum Otomatis	1	Botol	30,000	30,000
22	Kertas A4	2	Rim	50,000	100,000
23	Kertas F4	1	Rim	57,000	57,000
24	Kertas Glossy	0	Dus	15,000	6,000
25	Kertas Transparan	1	Pack	50,000	25,000
26	Kertas Warna	2	Rim	55,000	110,000
27	Lakban Hitam	0	Buah	18,000	-



Catatan Atas Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2021

28	Map Buffalo	1	Dus	70,000	52,500
29	Map Kertas	0	Dus	50,000	12,500
30	Map Ordener Lucky	1	Buah	20,000	20,000
31	Map Plastik	5	Kotak	12,000	60,000
32	Paku Payung	0	Kotak	3,500	-
33	Paper Clip	2	Kotak	3,000	6,000
34	Pembersih Lantai	1	Buah	25,000	25,000
35	Penggaris Besi	1	Buah	35,000	35,000
36	Pengharum Otomatis	2	Buah	55,000	110,000
37	Pengharum Ruangan	1	Buah	12,000	12,000
38	Spidol	0	Buah	8,500	-
39	Steples Besar	0	Buah	48,000	-
40	Steples Kecil	1	Buah	17,000	17,000
41	Sticky Note	0	Pack	2,500	-
42	Tinta Epson 664	1	Botol	150,000	150,000
43	Tinta Epson B 003	1	Botol	150,000	150,000
44	Tinta Epson B 664	1	Botol	150,000	150,000
45	Tinta Epson C 003	1	Botol	150,000	150,000
46	Tinta Epson M 003	1	Botol	150,000	150,000
47	Tinta Epson M664	1	Botol	150,000	150,000
48	Tinta Epson Y003	1	Botol	150,000	150,000
49	Tinta Epson Y664	1	Botol	150,000	150,000
50	Tipe X Set	1	Pack	3,500	3,500
51	Tissue	10	Buah	18,000	180,000
	TOTAL				2,488,500

Penyimpan/Pengurus Barang.

Praya, 11 Januari 2022
Yang Memeriksa

Akhdiyat Fahroni. ST
NIP.198503172009011003

Ninuk Silvia. SE
NIP. 197809242010012006



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **001/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.30,088,933.00**
(dengan huruf) *Tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi (PT.PERSADA SOKA TAMA)

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.PERSADA SOKA TAMA Tahun Anggaran 2020 (Piutang tahun 2020)	30,088,933.00
JUMLAH			30,088,933.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 27 Januari 2021

27 JAN 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Dik. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 196607061993031015

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 197809142009011003

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **016/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.12,895,257.00**
(dengan huruf) *Dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.GAMETRACO

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. GAMETRACO Tahun Anggaran 2021	12,895,257.00
JUMLAH			12,895,257.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 18 November 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Dik. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 196607061993031015

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 197809142009011003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. 013/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021

Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.313.784.587.00**
(dengan huruf) *Tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) Tahun Anggaran 2021	313.784.587.00
JUMLAH			313.784 587.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 15 Juni 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. 014/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021

Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.47,282,609.00**
(dengan huruf) *Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. TELEKOMUNIKASI

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. TELEKOMUNIKASI Tahun Anggaran 2021	47,282,609.00
JUMLAH			47,282,609.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 27 September 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **015/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.25,790,514.00**
(dengan huruf) *Dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat belas rupiah*
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.DAYA MITRA

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. DAYA MITRA Tahun Anggaran 2021	25,790,514.00
JUMLAH			25,790,514.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 10 November 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **012/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp. 4.298.419.00**
(dengan huruf) *Empat juta dua ratus sembilan puluh delapan empat ratus sembilan belas rupiah*
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA Tahun Anggaran 2021	4.298.419.00
JUMLAH			4.298.419.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 14 Junii 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **011/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.73,073,123.00**
(dengan huruf) *Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tiga rupiah*
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.DAYA MITRA

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. DAYA MITRA Tahun Anggaran 2021	73,073,123.00
JUMLAH			73,073,123.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 27 Mei 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

[Signature]
Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

Bendahara Penerima

[Signature]
Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **010/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.378,260,872.00**
(dengan huruf) *Tiga ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua rupiah*
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.PERSADA SOKA TAMA

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. PERSADA SOKA TAMA Tahun Anggaran 2021	378,260,872.00
JUMLAH			378,260,872.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 15 April 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

[Signature]
Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

Bendahara Penerima

[Signature]
Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **007/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : **BANK NTB**
No. Rekening : **003.21.00706.00-0**

Harap diterima uang sebesar **Rp.25,790,514.00**
(dengan huruf) *Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Belas rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.INDOSAT

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.INDOSAT Tahun Anggaran 2021	25,790,514.00
JUMLAH			25,790,514.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 14 April 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19680706 199303 1 015

4 APR 2021

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **008/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : **BANK NTB**
No. Rekening : **003.21.00706.00-0**

Harap diterima uang sebesar **Rp.146,146,246.00**
(dengan huruf) *Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA Tahun Anggaran 2021	146,146,246.00
JUMLAH			146,146,246.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 22 April 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19680706 199303 1 015

22 APR 2021

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

STS No. **009/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021**

Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.30,088,933.00**
(dengan huruf) *Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. INTI BANGUN SEJAHTERA

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. INTI BANGUN SEJAHTERA Tahun Anggaran 2021	30,088,933.00
		JUMLAH	30,088,933.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 13 April 2021

Mengetahui,
Pangguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

13 APR 2021

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

STS No. **006/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021**

Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.73,073,123.00**
(dengan huruf) *Tujuh Puluh Tiga Juta tujuh puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tiga rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.KOMET INFRA NUSANTARA

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.KOMET INFRA NUSANTARA Tahun Anggaran 2021	73,073,123.00
		JUMLAH	73,073,123.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 06 Mei 2021

06 MAY 2021

Mengetahui,
Pangguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **005/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.12,895,257.00**
(dengan huruf) *Dua belas juta delapanratus sembilan puluh lima ribudua ratus lima puluh tujuh rupiah*
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.SOLUSINDO KREASI PRATAMA

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.SOLUSINDO KREASI PRATAMA Tahun Anggaran 2021	12,895,257.00
JUMLAH			12,895,257.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 26 April 2021

26 APR 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. **004/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021** Bank : BANK NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar **Rp.103,162,056.00**
(dengan huruf) *Seratus tiga juta seratus eneam puluh dua ribu lima puluh enam rupiah*
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.TOWER BERSAMA

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.TOWER BERSAMA Tahun Anggaran 2021	103,162,056.00
JUMLAH			103,162,056.00

Uang tersebut diterima pada tanggal 26 April 2021

26 APR 2021


Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

Bendahara Penerima

Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

STS No. **003/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021**

Bank : BANK NTB

Harap diterima uang sebesar **Rp.30,088,933.00**

No. Rekening : 003.21.00706.00-0

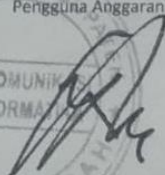
(dengan huruf) *Tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi (PT.CENTRATAMA MENARA INDONESIA)

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT.CENTRATAMA MENARA INDONESIA Tahun Anggaran 2021	30,088,933.00
JUMLAH			30,088,933.00

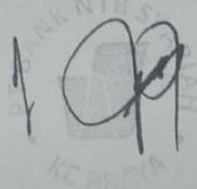
Uang tersebut diterima pada tanggal 22 Maret 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

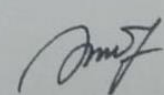


Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

22 MAR 2021



Bendahara Penerima



Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

STS No. **002/Kominfo/STS-RETRIBUSI/2021**

Bank : BANK NTB

Harap diterima uang sebesar **Rp.17,193,676.00**

No. Rekening : 003.21.00706.00-0

(dengan huruf) *Tujuh belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi (PT.XL AXIATA TBK)

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp
1		Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. XL AXIATA TBK Tahun Anggaran 2021	17,193,676.00
JUMLAH			17,193,676.00

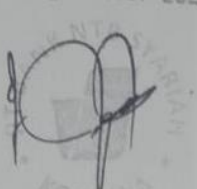
Uang tersebut diterima pada tanggal 26 Maret 2021

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. H. Muhammad Zarkasi
NIP. 19660706 199303 1 015

26 MAR 2021



Bendahara Penerima



Lalu Abdul Manap
NIP. 19780914 200901 1 003